



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HAMDANI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 667360

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.580.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 398 m2/283 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 510 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 670.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 21910 m2/40 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, WARISAN Rp. 410.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/80 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	386.500.000
1. MOTOR, YAMAHA XEON Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000		
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA JEEP Tahun 1978, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000		
4. MOBIL, HONDA HONDA HRV PRESTIGE Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	125.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	675.000.000



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----

Rp. 4.766.500.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.766.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.